

**ANALISIS YURIDIS IMPLIKASI PELAKSANAAN
KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK
(TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK)**

Oleh :

Dresia Christina Onasisia Mongkau, SH

NPM. 1502190005

TESIS

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian
Guna Memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum (MH)
Program Pendidikan Magister Program Studi Ilmu Hukum
Bidang Kaitan Utama Hukum Bisnis**



**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA
TAHUN 2017**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana, Magister) baik di Universitas Kristen Indonesia maupun di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Saya tidak keberatan untuk dipublikasikan oleh Universitas Kristen Indonesia dengan sarana apapun, baik seluruhnya atau sebagian untuk kepentingan akademik atau ilmiah yang non komersil sifatnya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, Nopember 2017

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 6000,-

(Dresia Christina Onasisia Mogkau, SH)

NPM. 1502190005

***“Analisis Yuridis Implikasi Pelaksanaan Kebijakan Pengampunan Pajak Bagi
Wajib Pajak (Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016
Tentang Pengampunan Pajak)”***

(Dresia Christina Onasisia Mongkau, SH ; NPM. 1502190005)

Dibawah Bimbingan Dosen :

Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA & Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH., M.H

ABSTRAK

Negara bertanggung jawab berperan aktif dalam rangka melaksanakan sistem perpajakan dengan benar, sehingga diperlukan adanya pondasi yang berlandaskan kejujuran maupun keterbukaan dari masyarakat dan itikad baik dari pemerintah. Adapun kewajiban pemerintah dalam mensejahterakan negara, diwujudkan melalui kebijakan program pengampunan pajak yang telah berlangsung untuk melaksanakan amanah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016. Kebijakan lahir dari adanya regulasi terkait pengampunan pajak, sehingga perlu diketahui juga asal mula yang menjadi landasan pemikiran tertentu terbentuknya regulasi tersebut. Alasan mendasar Indonesia menyelenggarakan program pengampunan pajak dan menerbitkan produk hukum dalam bentuk ketentuan perundang-undangan tersebut mempunyai landasan pertimbangan dari sudut pandang secara filosofis, sosiologis, dan yuridis. Hal ini menjadi landasan bagi pemberian fasilitas pengampunan pajak. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan (library research) yang mengkaji bahan hukum primer, diantaranya beberapa buku pendukung serta ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan. Mengacu pada pokok permasalahan dan berdasarkan landasan teoretis dalam penelitian ini, 3 kerangka teori yang digunakan ialah teori kesejahteraan negara oleh JM Keynes sebagai teori dasar (grand theory), teori keadilan oleh John Rawls sebagai teori menengah/tataran (middle theory), dan teori kehendak negara oleh Djafar Saidi sebagai teori terapan (applied theory). Kerangka teori tersebut menegaskan adanya keterkaitan setiap materi teori guna menunjang substansi topik penelitian. Kebijakan pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum terhadap pelaksanaannya sehingga terwujud stabilitas kondisi perekonomian negara yang baik secara nasional. Dengan adanya regulasi terkait dapat mengakomodir secara legalitas terhadap implikasi/dampak baik positif maupun negatif dari pelaksanaan program pengampunan pajak bagi wajib pajak di Indonesia.

Kata-kata kunci: Regulasi, Implikasi, Pengampunan Pajak, Wajib Pajak.

***“The Juridical Analysis Of The Implications Of The Tax Amnesty Policy
Implementation For Taxpayers (Review Of Republic Indonesia Government
Regulation Number Of 11 Year 2016 On Tax Amnesty)”***

(Dresia Christina Onasisia Mongkau, SH ; NPM. 1502190005)

Under The Guidance Of :

Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH., MH., MBA & Dr. Daniel Yusmic P. Foekh, SH., M.H

ABSTRACT

The State is responsible for taking an active role in the proper implementation of the taxation system, so that there is a foundation that is based on honesty and openness from the public and the goodwill of the government. The government's obligation in the prosperity of the state, realized through the policy of tax amnesty program that has been going on to implement the mandate of the Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2016. The policy was born from the existence of regulation related to tax amnesty, so it is necessary to know also the origin of which became the foundation of certain thinking the regulation. The fundamental reason for Indonesia to organize a tax amnesty program and to issue legal products in the form of legislation has a consideration from a philosophical, sociological and juridical point of view. This becomes the basis for the granting of tax amnesty facilities. This research is a normative law research or library research that examines the primary legal materials, including some supporting books and the provisions of legislation related to the subject matter. Referring to the subject matter and based on the theoretical foundation in this study, the 3 theoretical frameworks used are the theory of state welfare by JM Keynes as the theory of justice by John Rawls as middle theory, state by Djafar Saidi as applied theory. The theoretical framework emphasizes the linkage of each theoretical material to support the substance of the research topic. This government policy, is expected to give a sense of justice and legal certainty to its implementation so as to realize the stability of national economic conditions nationally good. With the existence of related regulations can accommodate legally to the implications / impacts both positive and negative from the implementation of tax amnesty programs for taxpayers in Indonesia.

Keywords: *Regulation, Implications, Tax Amnesty, Taxpayers.*

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRAK (<i>ABSTRACT</i>)	v
MOTTO & PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Perumusan Masalah	11
1.3 Maksud & Tujuan Penelitian	11
1.3.1 Maksud Penelitian	11
1.3.2 Tujuan Penelitian	12
1.4 Kerangka Teoritis & Konsep	13
1.4.1 Kerangka Teoritis	13
1.4.2 Kerangka Konsep	16
1.5 Metode Penelitian	17
1.5.1 Tahapan Penelitian	17
1.5.2 Metode Analisa Data	21
1.5.3 Lokasi Penelitian	23
1.5.4 Kajian Pustaka	24
1.6 Sistematika Penulisan	27

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kajian Teoretis	31
2.1.1 Teori Kesejahteraan Negara (<i>Welfare State Theory</i>) Sebagai Teori Dasar/Teori Utama (<i>Grand Theory</i>)	31
2.1.2 Teori Keadilan (<i>Theory Of Justice</i>) Sebagai Teori Menengah/Teori Tataran (<i>Middle-Range Theory</i>).	35
2.1.3 Teori Kehendak Negara (<i>Theory Of The Will Of The The State</i>) Sebagai Teori Aplikatif/Teori Terapan (<i>Applied Theory</i>)	41
2.2 Kajian Konseptual	43
2.2.1 Pengertian Kebijakan Publik	43
2.2.2 Pengertian Implikasi	47
2.2.3 Pengertian Pajak, Wajib Pajak, dan Pengampunan Pajak ..	48
2.2.4 Azas-Azas & Prinsip-Prinsip Pengampunan Pajak	57
2.2.5 Konsep Slogan (<i>Tagline</i>) Pengampunan Pajak	63

BAB III DASAR PERTIMBANGAN SEBAGAI LANDASAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK

3.1 Landasan Pembentukan Regulasi Pengampunan Pajak (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016)	67
3.1.1 Perspektif Filosofis	71
3.1.2 Perspektif Sosiologis	74
3.1.3 Perspektif Yuridis	79
3.2 Analisis Konsep Dasar Pengampunan Pajak	85
3.2.1 Pertimbangan Pelaksanaan Pengampunan Pajak	86
3.2.2 Kerahasiaan Data dan Informasi	90
3.2.3 Dimensi Pengampunan Pajak	97
3.2.3.1 Fasilitas & Jenis-Jenis Pengampunan Pajak	98
3.2.3.2 Karakteristik Pengampunan Pajak	104

**BAB IV IMPLIKASI YURIDIS BAGI WAJIB PAJAK TERHADAP
PELAKSANAAN KEBIJAKAN PROGRAM PENGAMPUNAN PAJAK**

4.1	Praktek Penyelenggaraan Program Pengampunan Pajak	109
4.1.1	Subjek & Objek Pengampunan Pajak	110
4.1.2	Periode & Tata Cara Pemberian Pengampunan Pajak	118
4.1.3	Sistem & Praktek Pengampunan Pajak	123
4.1.4	Langkah-Langkah Implementasi Pengampunan Pajak	130
4.1.5	Perbandingan Kebijakan Implementasi Pengampunan Pajak Negara Lain & Praktek Penyelenggaraan Di Beberapa Negara	134
4.2	Analisis Implikasi Pelaksanaan Program Pengampunan Pajak...	145
4.2.1	Perbedaan Antara Wajib Pajak Yang Mengikuti & Tidak Mengikuti Pada Program Pengampunan Pajak	149
4.2.2	Upaya Meningkatkan Kesadaran & Kepatuhan Wajib Pajak	153
4.2.3	Pro & Kontra Program Pengampunan Pajak	157
4.2.4	Manfaat Keunggulan & Kelemahan Pengampunan Pajak ..	161
4.2.5	Efektifitas & Efisiensi Pengampunan Pajak	164

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan	167
5.2	Saran	168

DAFTAR PUSTAKA	171
-----------------------------	-----

LAMPIRAN	181
-----------------------	-----

- **UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK**
- **LEMBARAN NEGARA NOMOR 131 MENGENAI PENJELASAN
ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016
TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK**